

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN
PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH
DAN *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:
SULIS SETYORINI
B200150004**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN
PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH
DAN *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2015-2017)**

PUBLIKASI ILMIAH

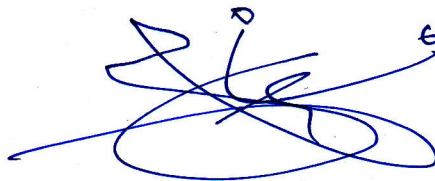
Oleh:

SULIS SETYORINI

B200150004

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, representing the name of the supervisor.

(Drs. Yuli Tri Cahyono, M.M., Ak.)

NIDN: 0625076001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN
PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH
DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2015-2017)**

Yang ditulis oleh:

SULIS SETYORINI

B200150004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Yuli Tri Cahyono, MM., Ak.

()

(Ketua Dewan Penguji)

2. Shinta Permata Sari, S.E., M.M.

()

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Erma Setiawati, M.M., Ak., CA.

()

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



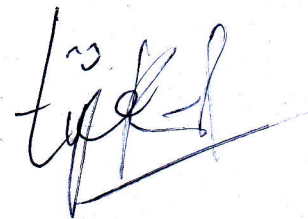
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2020

Penulis



SULIS SETYORINI

B200150004

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMANDIRIAN
PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH
DAN *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2015-2017)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel sebanyak 34 kabupaten/kota. Pada penelitian ini data disusun secara *time series*, dengan periode penelitian selama tiga tahun, jadi jumlah data yang diperoleh sebanyak 114 data. Data diuji menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh.

Kata kunci: ukuran pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Abstract

This study aims to analyze the effect of local government size, local government independence, local government wealth, and intergovernmental revenue on the level of disclosure of local government financial statements. The study was conducted in district/ cities in East Java Province in 2015-2017. The research sample was taken by using purposive sampling method. Based on predetermined criteria, a total sample of 34 district /cities was obtained. In this study the data are arranged in time series, with a research period of three years, so the total data obtained is 114 data. Data were tested using logistic regression methods. The results of this study indicate that the independence of local government and intergovernmental revenue affects the level of disclosure of local government financial statements, while the size of local government and local government wealth does not affect.

Keywords: size of local government, independence of local government, local government wealth, intergovernmental revenue, level of disclosure of local government financial statements.

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi menjadi semakin penting. Semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai akuntabilitas publik berupa pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dewasa ini, praktik akuntansi sektor publik banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah banyak mendapat perhatian dibanding masa-masa sebelumnya. Akuntansi sektor publik menjadi tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntansi sektor publik tersebut mengakibatkan perlu adanya tata kelola urusan publik yang baik.

Di Indonesia masih sangat rendah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini terbukti karena masih banyak kabupaten/kota di Indonesia yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena informasi dalam laporan keuangan daerahnya tidak lengkap.

Dalam kurun waktu 12 tahun di Era Reformasi, Indonesia sedang melakukan pembenahan di segala bidang, termasuk pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara. Saat ini pemerintah dituntut untuk lebih transparan memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan negara pada masyarakat. Terlebih adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah

kewenangannya. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga publik merupakan barang publik yang diperoleh masyarakat.

2. METODE

2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2015-2017 yang berasal dari Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Jawa Timur dan *website* BPK (<http://www.bpkp.go.id/>).

2.2 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2017. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel (*purposive sampling*) sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2015-2017.
- b. Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang Melaporkan LKPD secara sukarela, Lengkap, dan Transparan.

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.3.1 Tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah

Tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah merupakan perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam mengukur tingkat pengungkapan, penelitian ini menggunakan indeks *scoring*. Indeks *scoring* yang dimaksud yaitu menggunakan skor pengungkapan yang diwajibkan berdasar Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 pada kabupaten atau kota. Skor 1 untuk tiap item pengungkapan laporan keuangan yang terdapat dalam pemerintah daerah, sedangkan skor 0 untuk tiap item pengungkapan laporan keuangan yang tidak terdapat dalam pemerintah daerah.

2.3.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset pemerintah daerah tersebut. Menurut penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan *natural log total asset*. Karena total aset pemerintah daerah bernilai milyaran rupiah, maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam *logaritma natural*.

2.3.3 Kemandirian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian daerah yang tinggi menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya untuk dijadikan sumber daya, sehingga pemerintah daerah tidak bergantung hanya dari dana transfer pemerintah pusat (Mahmudi, 2007:14). Menurut Nordiawan (2010:78) kemandirian keuangan pemerintah daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain. Rumus untuk menentukan kemandirian pemda adalah:

$$MPD = \frac{PAD}{TDT + TK} \quad (1)$$

Keterangan:

MPD = Kemandirian Pemerintah Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TDT = Total Dana Transfer

TK = Total Kewajiban

2.3.4 Kekayaan Pemerintah Daerah

Menurut Nordiawan (2010:77) kekayaan pemerintah daerah atau disebut juga dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekayaan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan *natural log*

PAD. Pendapatan asli pemerintah daerah bernilai milyaran rupiah dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam *logaritma natural*.

2.3.5 *Intergovernmental Revenue*

Menurut Widodo (2010:260) *intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini membandingkan total pendapatan dalam mengukur *intergovernmental revenue*. Rumus untuk menentukan *intergovernmental revenue* adalah:

$$IRGOV = \frac{TDP}{TP} \quad (2)$$

Keterangan:

IRGOV = *Intergovernmental Revenue*

TDP = Total Dana Perimbangan

TP = Total Pendapatan

2.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah:

$$TPLKPD = \alpha + \beta_1 UPD + \beta_2 MPD + \beta_3 KPD + \beta_4 IRGOV + e \quad (3)$$

Keterangan:

TPLKPD = Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

UPD = Ukuran Pemerintah Daerah

MPD = Kemandirian Pemerintah Daerah

KPD = Kekayaan Pemerintah Daerah

IRGOV = *Intergovernmental Revenue*

e = *Error*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Fit Model

Uji ini digunakan untuk menilai model yang dihipotesiskan telah fit atau tidak dengan data. Adapun dalam *overall model fit test value* dapat dilihat dari uji -2 log likelihood (-2LL). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai -2 log likelihood (-2LL) pada awal (*Block Number 0*) dengan nilai -2 log likelihood (-2LL) pada akhir (*Block Number 1*), pengurangan nilai -2LL antara awal dengan nilai -2LL pada akhir menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Hasil uji fit model dengan -2 log likelihood (-2LL) dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Uji fit model 1

		<i>Coefficients</i>	
<i>Iteration</i>		-2 Log likelihood	Constant
<i>Step 0</i>	1	151,092	0,491
	2	151,089	0,501
	3	151,089	0,501

Sumber: Hasil olah data penulis, 2019.

Tabel 2. Uji fit model 2

		<i>-2Log likelihood</i>	<i>Coefficients</i>				
<i>Iteration</i>			Constant	UPD	MPD	KPD	IRGOV
<i>Step 1</i>	1	133,705	-6,902	,379	3,988	-,371	8,585
	2	133,368	-7,099	,457	4,967	-,481	9,671
	3	133,359	-7,060	,474	5,145	-,505	9,749
	4	133,359	-7,059	,475	5,152	-,506	9,752
	5	133,359	-7,059	,475	5,152	-,506	9,752

Sumber: Hasil olah data penulis, 2019.

Pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan perbandingan nilai -2LL *block* pertama dengan nilai -2LL *block* kedua. Nilai -2LL dari *block* pertama sebesar 151,089 lebih besar dari pada nilai -2LL pada *block* kedua sebesar 133,359. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model kedua setelah memasukan variabel independen lebih baik dari pada model sebelum

memasukan variabel independen yang berarti model penelitian dikatakan fit dengan data.

3.2 Koefisien Determinasi (*Nagelkerke's R Square*)

Nagelkerke's R square merupakan modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:341). Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Koefisien determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R	
		Square	Nagelkerke R Square
1	133,359 ^a	0,071	0.097

Sumber: Hasil olah data penulis, 2019.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Nagelkerke's R square* sebesar 0,097, hal ini berarti bahwa 9,7% variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel ukuran pemerintahan daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue*. Sedangkan sisanya 90,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

3.3 Uji Kelayakan Model

3.3.1 Uji Hosmer and Lemeshow

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05, maka model regresi tersebut mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2011:341). Uji kelayakan model dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Uji kelayakan model

<i>Step</i>	<i>Chi-square</i>	<i>Df</i>	<i>Sig,</i>
1	10,517	8	0,231

Sumber: Hasil olah data penulis, 2019.

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,231 nilai ini lebih besar dari 0,05. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya, sehingga model dapat dilanjutkan untuk uji hipotesis.

3.3.2 Tabel Klasifikasi

Hasil dari tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi model regresi untuk memprediksi kemungkinan pemberian tingkat pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. *Classification table*

			<i>Predicted</i>		
			TPLKPD		
<i>Observed</i>			0	1	<i>Percentage Correct</i>
<i>Step 0</i>	TPLKPD	0	0	43	,0
		1	0	71	100,0
<i>Overall Percentage</i>					62,3

Sumber: Hasil olah data penulis, 2019.

Berdasarkan data dari tabel 5 menunjukkan bahwa menurut prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan pemerintah daerah mengungkapkan laporan keuangan adalah sebesar 62,3%. Artinya, kemampuan prediksi dari model dengan variabel ukuran pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* secara sistematis dapat memprediksi sebesar 62,3%.

3.4 Regresi Logistik (*Logistic Regression*)

Pengujian koefisien regresi untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil regresi logistik dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Uji hipotesis

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	UPD	,475	,823	,333	1	,564	1,608
	MPD	5,152	2,505	4,230	1	,040	172,837
	KPD	-,506	,702	,520	1	,471	,603
	IRGOV	9,752	4,152	5,516	1	,019	17188,137
	Constant	-7,059	18,724	,142	1	,706	,001

Sumber: Hasil olah data penulis, 2019.

Berdasarkan tabel 6, model regresi logistik yang diperoleh adalah:

$$\text{TPLKPD} = -7,059 + 0,475\text{UPD} + 5,152\text{MPD} - 0,506\text{KPD} + 9,752\text{IRGOV} + e$$

Adapun intepretasi dari rumus regresi tersebut adalah:

- α : Nilai konstata sebesar -7,059 artinya apabila variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan *intergovernmental revenue* diasumsikan tetap atau bernilai 0 atau konstan. Dengan demikian, kemungkinan pemerintah daerah memperoleh tingkat pengungkapan laporan keuangan adalah sebesar 7,059.
- β_1 : Nilai koefisien regresi untuk variabel UPD sebesar +0,475. Hal ini berarti jika semakin tinggi ukuran pemerintah daerah (UPD), maka kemungkinan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin besar. Sebaliknya jika semakin rendah ukuran pemerintah daerah (UPD), maka kemungkinan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin kecil.
- β_2 : Nilai koefisien regresi untuk variabel MPD sebesar +5,152. Hal ini berarti jika semakin tinggi kemandirian pemerintah daerah (MPD), maka kemungkinan tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemerintah daerah akan semakin besar. Sebaliknya jika semakin rendah kemandirian pemerintah daerah (MPD), maka kemungkinan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin kecil.

- β3: Nilai koefisien regresi untuk variabel KPD sebesar -0,506. Hal ini berarti jika semakin tinggi kekayaan pemerintah daerah (KPD), maka kemungkinan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin kecil. Sebaliknya jika semakin rendah kekayaan pemerintah daerah (KPD), maka kemungkinan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin besar.
- β4: Nilai koefisien regresi untuk variabel *IRGOV* sebesar +9,752. Hal ini berarti jika semakin tinggi *intergovernmental revenue (IRGOV)*, maka kemungkinan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin besar. Sebaliknya jika semakin rendah *intergovernmental revenue (IRGOV)*, maka kemungkinan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin kecil.

3.5 Pembahasan

- 3.5.1 Hasil dari hipotesis pertama pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset. Besaran kepemilikan aset oleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan total aset besar cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang kurang baik dan memperoleh catatan BPK. Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki informasi yang cukup terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Waliyyani et al (2015) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

- 3.5.2 Hasil dari hipotesis kedua pengaruh kemandirian pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Pemerintah daerah dengan kemandirian daerah yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang baik. Jika semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka pemerintah daerah cenderung untuk berusaha melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya untuk mendapatkan penilaian yang baik pula. Hal tersebut mendapatkan pandangan positif dari pemerintah pusat terhadap kinerja dari pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hidayah (2017) yang mengungkapkan bahwa kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

- 3.5.3 Hasil dari hipotesis ketiga pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah akan berusaha menunjukan tanggungjawab atas kinerjanya yang baik melalui hasil kekayaan yang besar dan sumber daya yang banyak, sehingga berupaya mengungkapkan laporan keuangan dengan lebih baik. Namun dalam sudut pandang yang lain, jumlah kekayaan yang besar juga dapat menjadi tolok ukur kinerja pihak pemerintah daerah yang cenderung buruk dalam melakukan manajemen atas aset yang dimiliki. Dasar inilah yang menjadi penyebab kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marliani et al (2018) yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

- 3.5.4 Hasil dari hipotesis keempat pengaruh *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dengan *intergovernmental revenue* yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat untuk membiayai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi akan menuntut pengungkapan yang cukup lengkap sebagai upaya untuk memonitor kinerja pemerintah daerah atas penggunaan dana transfer. Sehingga pemerintah daerah akan didorong untuk meningkatkan transparansi dana yang diterima dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hidayah (2017) bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Ukuran pemerintah daerah (UPD) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,56 > 0,05$. Hal ini berarti **H₁ ditolak**.
- 2) Kemandirian pemerintah daerah (MPD) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,04 < 0,05$. Hal ini berarti **H₂ diterima**.
- 3) Kekayaan pemerintah daerah (KPD) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,47 > 0,05$. Hal ini berarti **H₃ ditolak**.
- 4) *Intergovernmental revenue* (IRGOV) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,02 < 0,05$. Hal ini berarti **H₄ diterima**.

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan keterbatasan penelitian antara lain:

- 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan penelitiannya, dimana menggunakan variabel lain selain ukuran pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- 3) Pemerintah pusat/provinsi dapat mengurangi dana transfer (*intergovernmental revenue*) apabila kemandirian daerahnya semakin tinggi. Hal tersebut supaya pemerintah daerah kemandiriannya lebih baik dan tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat/provinsi serta agar pemerintah bisa menyalurkan dana transfer tersebut ke desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, J.H., et al. 1997. Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy Management Review*, 22: 20-47.
- Evans, Thomas G. 2013. *Accounting Theory: Contemporary Accounting Issue*. USA: South Western.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS (Edisi 3)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (Edisi 4)*. Semarang Indonesia: Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi 5)*. Semarang Indonesia: Penerbit UNDIP.

Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 (Edisi 6). Semarang Indonesia: Penerbit UNDIP.

Ghozali, Imam., A. Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Hendriyani, Ririn., Afrizal Tahar. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Hal. 25 – 33 Vol. 22, No. 1- 25 ISSN: 1412-312625.

Hidayah, Dhaulika. 2017. Pengaruh Kemandirian Daerah, Intergovernmental revenue, dan Kekayaan Daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi riau tahun 2009-2014). *JOM Fekon* Vol. 4 No. 2.

Ikatan Akuntan Indonesia.2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Kawedar, Warsito., et al. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Buku I. Cetakan I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Khasanah, Nur Lailatul., Shiddiq Nur Raharjo. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 3, No. 3. Hal 1-11. ISSN (*Online*): 2337-3806.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Marliani, Meli., et al. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur). *E-JRA* Vol. 07 No. 10 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

PP RI No. 71 Tahun 2010.

Setyaningrum, Dyah., Febriyani Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, hal 154-170.

Simbolon, Henny Agnecia Uliarta., Christophorus Heni Kurniawan. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia. *MODUS* Vol. 30 (1): 54-70 ISSN 0852-1875 / ISSN (Online) 2549-3787.

Suhardjanto, Djoko., Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 8/No. 1 Hal 1-94.

Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Usamah. 2010. *Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian*. Tesis UNDIP.

Waliyyani, Ghaniyyu Mintotik., Amir Mahmud. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. ISSN 2252-6765.

Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik). Malang: Bayumedia.